



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.07.0001
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Nama Rekening : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
Jumlah Anggaran (DPA) : 198,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 198,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				90,200,000.00
2	01 Agustus 2024	00473	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (HONORARIUM PPKD/PA/KPA) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	2,590,000.00	87,610,000.00
3	01 Agustus 2024	00474	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (HONORARIUM PPTK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	7,150,000.00	80,460,000.00
4	01 Agustus 2024	00475	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PPK SKPD) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	990,000.00	79,470,000.00
5	01 Agustus 2024	00476	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (STAF/PEMBANTU PPK SKPD) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	2,310,000.00	77,160,000.00
6	01 Agustus 2024	00477	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (BENDAHARA PENGELUARAN) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	860,000.00	76,300,000.00
7	01 Agustus 2024	00478	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	74,800,000.00

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	15,400,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	107,800,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	123,200,000.00	


Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.07.0001

Buku Kas No. : 00478

Tanggal : 1-8-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ==

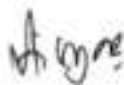
Untuk Pembayaran : BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

BENDAHARA PENGELUARAN



ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

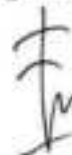
MENGETAHUI

**KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK**



YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar, 1-8-2024
Yang Menerima,



Jumlah Uang Rp. 1.500.000,-

DAFTAR: BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN (PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 070.04/0010/KEP/I/2024 / 08 Januari 2024
 Kegiatan : 5.05.01.2.02 / Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0002 / Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 Rekening : 5.1.01.03.07.0001 / Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	FIRNAWATI, SE 66.477.731.5-805.000 Rekening : 1462010000013784	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	500.000	x 1		500.000				25.000	475.000	1
2	MUNIR M, S.Sos 08.282.008.5-801.000 Rekening : 1352010000052641	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	500.000	x 1		500.000				25.000	475.000	2
3	SITI FATIMAH NUR SYACHRIANI, S.Sos 46.515.886.3-805.000 Rekening : 1462010000005901	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	500.000	x 1		500.000				25.000	475.000	3
	JUMLAH					1.500.000				75.000	1.425.000	

TERBILANG: SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 1-8-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRWAN NISWAN MUNGKASA, ST. M.AP
 NIP. 197304252005021001

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN SELAKU PPTK


YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
 NIP. 19810610 201001 1 021

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
 NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
 NIP. 19770826 201212 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.297.298.2-804.000
NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
ALAMAT : JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 402
MASA PAJAK : 08-08
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.75.000
TERBILANG : Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah

URAIAN : Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran sub Keg Peny ADM Pelaksanaan
Tugas ASN

NPWP PENYETOR : 00.297.298.2-804.000
NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0291 7171 4786 006
MASA AKTIF : 31/08/2024 07:41:46

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



This is a computer generated message and required no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

DATA SETORAN :
Kode Billing : 029171714786006
NPWP : 002972982804000
Nama Wajib Pajak : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
Alamat : JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR
Jumlah Denda : 1
Jumlah Setoran : 75.000
Masa Uang : 108
Terbilang : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

DATA PEMBAYARAN :
Tanggal & Jam Bayar : 01-08-2024 13:32:56
NTN : 000000115303
NTPN : ADEFE0004C8R50AM
Kode Cabang Bank : 146000
STAN : 115303



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 070.04/010/KEP/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk efisien dan efektifnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

- KESATU** : Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- membantu Bendahara Pengeluaran dalam menjalankan tugasnya.
- KETIGA** : Kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan tambahan penghasilan berupa honorarium bulanan yang berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 08 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,**



HERMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.AP
Pembantu Pembina Tk. I
NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 070.04/010/KEP/1/2024
 TANGGAL : 08 JANUARI 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	NAMA, NIP, GOLONGAN DAN JABATAN	
		PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	
1	2	3	
1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nama	: FIRNAWATI, SE
		NIP	: 19770826 201212 2 001
		Golongan	: III/c
		Jabatan	: PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
		Nama	: SITI FATIMAH NUR SYACHRIANI, S.Sos
		NIP	: 19901229 202012 2 002
		Golongan	: III/a
		Jabatan	: PEMBANTU PPK
		Nama	: MUNIR M., S.Sos
		NIP	: 19690706 198911 1 002
		Golongan	: III/b
		Jabatan	: PEMBANTU PPK



MUSAWAN MUNGKASA, S.T., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001